



# ANALISA GENDER KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

## KATA PENGANTAR

Salah satu isu yang terus menjadi perhatian utama dalam setiap proses pembangunan adalah mengenai masalah *gender gap* atau ketidaksetaraan antara perempuan dengan laki-laki. *Gender gap* ini mencakup berbagai bidang diantaranya pendidikan, kesehatan, wewenang dalam pengambilan keputusan, kesempatan berpartisipasi dalam komunitas masyarakat, dan sebagainya.

Di negara-negara maju, dimana sudah terdapat keseimbangan peran antara kaum perempuan dan laki-laki, kesadaran akan kesetaraan *gender* menjadi sesuatu yang jamak dijumpai. Dilihat dari kacamata sosial, baik perempuan maupun laki-laki memiliki pandangan *egalitarianisme* (meyakini bahwa setiap individu bersamaan hak-haknya dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi).

Publikasi Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ini merupakan publikasi yang disusun dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sudah berperspektif *gender*. Publikasi ini berisikan tentang informasi mengenai kondisi sosial demografi perempuan dan laki-laki serta penghitungan IPG Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017.

Data-data yang disajikan dalam buku ini berdasarkan data yang diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo maupun data-data dari dinas/instansi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Akhirnya, kami berharap semoga penulisan buku ini memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan dalam mengemban misi terwujudnya kesetaraan Gender di Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, Agustus 2018  
**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SIDOARJO**

**Drs. Y. SISWOJO**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590722 198501 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Istilah	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud	2
1.3 Tujuan	3
BAB II. METODOLOGI	4
2.1 Perubahan Metode Penghitungan indikator	4
2.1.1 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	8
2.1.2 Penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	11
2.1.3 Penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	15
2.2 Metode Analisis	16
2.3 Sumber Data	16
2.4 Waktu Pelaksanaan	16
BAB III. KEBIJAKAN GENDER	17
3.1 Ketentuan Penting	17
3.2 Beberapa Fakta Sejarah	19
BAB IV. KONDISI WILAYAH	21
4.1 Keadaan Geografis	21
4.2 Sejarah Kabupaten Sidoarjo	22
4.3 Kondisi Sosial Budaya	24
BAB V. DEMOGRAFI	27
5.1 Rasio Jenis Kelamin	27
5.2 Struktur Umur Penduduk	29

	<b>Halaman</b>
BAB VI. PENDIDIKAN	33
6.1 Partisipasi Sekolah	33
6.2 Angka Melek Huruf (AMH)	35
6.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	37
BAB VII. KESEHATAN	39
7.1 Keluhan Kesehatan	39
7.2 Keluarga Berencana	42
7.3 Angka Harapan Hidup	43
BAB VIII. KETENAGAKERJAAN	45
8.1 Penggunaan Waktu Terbanyak	45
8.2 Lapangan Pekerjaan	47
8.3 Status Kedudukan Dalam Pekerjaan	49
8.4 Jumlah Jam Kerja	50
BAB IX. SEKTOR PUBLIK	51
9.1 Legislatif	51
9.2 Perempuan Dan Laki-Laki Pegawai Negeri Sipil	52
BAB X. INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	55
BAB XI. INDEK PEMBERDAYAAN GENDER	59
BAB XII. PENUTUP	63
11.1 Kesimpulan	63
11.2 Saran-Saran	64

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Nilai Minimum dan Maksimum Penghitungan Indikator IPM	10
Tabel 2.2	Perbedaan Penghitungan IPM Metode Lama dan Metode Baru	11
Tabel 2.3	Nilai Minimum dan Maksimum Penghitungan Indikator IPG	13
Tabel 4.1	Daftar Nama-nama Bupati Sidoarjo Tahun 1859 – 2017.	23
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2015 – 2017.	28
Tabel 5.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2017.	28
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2016 - 2017.	29
Tabel 5.4	Angka Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017.	30
Tabel 5.5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2017.	32
Tabel 6.1	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Usia Sekolah, Tahun 2017.	34
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kemampuan Membaca Dan Menulis, Tahun 2017.	36
Tabel 6.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015 - 2017.	36
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2017.	38
Tabel 7.1	Persentase Penduduk Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2016 - 2017.	40
Tabel 7.2	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari, Tahun 2017.	40

	<b>Halaman</b>
Tabel 7.3	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Hari Sakit, Tahun 2017. 41
Tabel 7.4	Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi, Tahun 2017. 42
Tabel 7.5	Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara Kontrasepsi Yang Sedang Digunakan, Tahun 2017. 43
Tabel 8.1	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dilihat Dari Penggunaan Waktu Terbanyak Dalam Seminggu Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017. 46
Tabel 8.2	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut TPAK, TPT, TKK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017. 47
Tabel 8.3	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Sektor Lapangan Pekerjaan Yang Utama di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017. 48
Tabel 8.4	Persentase Status Kedudukan Dalam Pekerjaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017. 49
Tabel 8.5	Persentase Jumlah Jam Kerja Perminggu Antara Laki-Laki Dan Perempuan, Tahun 2017. 50
Tabel 9.1	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin dan Asal Partai, Tahun 2017. 51
Tabel 9.2	Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Hasil Pemilu Tahun 1999-2017. 52
Tabel 9.3	Jumlah PNS Di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo Berdasarkan Golongan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017. 53
Tabel 9.4	Jumlah PNS Di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017. 54
Tabel 10.1	Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2015 – 2017. 58
Tabel 10.2	Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2015 - 2017. 62

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Sidoarjo	21
Gambar 5.1	Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017.	31
Gambar 6.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah, Tahun 2017.	35
Gambar 7.1	Perbandingan Angka Harapan Hidup Laki-Laki Dan Perempuan, Tahun 2017.	44
Gambar 9.1	Persentase Jumlah PNS, Golongan dan Pemegang Jabatan per Jenis Kelamin, Tahun 2014.	54
Gambar 10.1	Perkembangan IPG Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2012 – 2017 .	56
Gambar 11.1	Perkembangan IDG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 - 2017.	61

## DAFTAR ISTILAH

**BPS** : Badan Pusat Statistik

**SUSENAS** : Survei Sosial Ekonomi Nasional

**SAKERNAS** : Survei Angkatan Kerja Nasional

**Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI) :**

Hampir sama dengan IPM namun pada penghitungan Indeks Pembangunan Gender, komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki.

**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM) :**

Merupakan indeks komposit dari Tiga komponen penyusun yaitu: keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan

**UNDP** : United Nation Development Program

**Rata-rata Pertumbuhan Penduduk :**

Angka rata-rata yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.

**Sex Ratio (SR)/ Rasio Jenis Kelamin :**

Perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan dalam persen.

**Dapat Membaca dan Menulis (Melek Huruf) :**

Mereka yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin atau lainnya, serta huruf braile untuk orang buta.

**Penduduk Usia Kerja** : Penduduk usia 10 tahun ke atas

**Angkatan Kerja :**

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan.



**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) :**

Merupakan perbandingan antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

**Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/ Employment Rate :**

Merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang bekerja dengan banyaknya angkatan kerja.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ Unemployment Rate :**

Merupakan perbandingan antara banyaknya pencari kerja dan banyaknya angkatan kerja.

**Anak Masih Hidup (AMH) :**

Perbandingan antara jumlah anak yang masih hidup dengan jumlah anak yang dilahirkan hidup.

**Keluhan Kesehatan :**

Keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu isu penting yang tidak pernah berhenti dibahas di negara terbelakang, negara berkembang sampai dengan negara maju adalah pembangunan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah membawa negara pada keadaan yang dianggap lebih baik dan lebih bernilai. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya secara adil dan merata dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Hasil pembangunan harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Isu mengenai pembangunan berkesetaraan Gender dalam arti peran laki-laki dan perempuan yang setara dalam proses pembangunan maupun kesetaraan pada pemerataan hasil pembangunan telah menjadi kesepakatan global maupun nasional.

Pada tahun 2000, Indonesia bersama dengan 188 negara ikut menandatangani Millenium Development Goals (MDG). Beberapa butir penting yang terkait langsung dengan isu Gender adalah kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, menghilangkan kesenjangan Gender dalam pendidikan dasar, meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian ibu. Dan hal ini dilanjutkan dengan adanya *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang tertuang dalam salah satu tujuannya yaitu meraih kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan.

Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan ini tentunya harus menyeimbangkan peran antara laki-laki dan perempuan. Beberapa kajian masih menyatakan bahwa proses pembangunan yang ada masih kurang berperspektif Gender, padahal antara laki-laki dan perempuan diharapkan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam proses pembangunan itu sendiri.

Kesenjangan Gender di berbagai bidang pembangunan ditandai oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses dan kontrol yang dimiliki serta manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan.

Adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesetaraan Gender adalah adanya suatu kondisi dan perlakuan yang *fair* baik terhadap laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan Gender berarti bahwa peluang dan hak-hak seseorang bukan ditentukan oleh kondisi seksual biologi mereka. Dengan demikian kesetaraan dan keadilan Gender merupakan suatu agenda untuk menciptakan status yang setara antara laki-laki dan perempuan dan memberikan kesetaraan kondisi kehidupan dan kesempatan yang sama untuk memahami potensi dan hak-hak dasar masing-masing. Kesetaraan dan keadilan Gender juga berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi secaraimbang dan optimal pada bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bersama-sama mampu mendapatkan manfaatnya.<sup>1</sup>

Penulisan buku ini berupaya menyajikan perkembangan kondisi sosial ekonomi perempuan serta pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sidoarjo yang disajikan dalam bentuk data dan analisa.

## 1.2 Maksud

Publikasi Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018, secara umum mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Untuk membentuk paradigma baru di kalangan masyarakat luas (terutama aparat pemerintah dan kalangan terdidik) bahwa pembangunan manusia dan sosial mempunyai makna yang lebih luas dan lebih berarti dibandingkan pembangunan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto, Prof. Dr. M.A - *Handbook on Gender in Parliament*,.

- b. Ikut menunjang program otonomi daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan di daerah yang didukung oleh partisipasi dari masyarakat luas.
- c. Sebagai acuan dasar perencanaan dan sebagai bahan evaluasi sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak Pemerintah daerah dapat menguntungkan semua pihak.

### **1.3 Tujuan**

Beberapa tujuan yang akan dicapai dalam Publikasi Analisa Gender yakni:

- a. Memberikan gambaran masalah kesenjangan Gender yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Sebagai alat bantu perencanaan (*planning tool*) pembangunan Kabupaten yang lebih mengakomodasikan dimensi pembangunan sosial berwawasan kemitra sejajar Gender.
- c. Sebagai data dasar bagi seluruh instansi terkait dalam menyelenggarakan program pembangunan yang lebih mencerminkan kesetaraan Gender.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Perubahan Metode Penghitungan Indikator**

Ilmu Statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan. Ilmu statistik dari tahun ke tahun terus berkembang. Perkembangan ini sejalan dengan semakin berkembang peradapan, kondisi sosial masyarakat dan sebagainya.

Begitu juga dalam pengukuran indikator-indikator sosial juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu statistik dan kondisi sosial masyarakat pada zamannya. Perubahan-perubahan ini juga menyentuh pada metodologi dalam pengukuran indikator sosial seperti Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG).

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (United Nations Development Programme), IPM terus mendapat banyak sorotan. Ada yang mengkritik dan juga ada yang mendukung. Mereka yang mengkritik berpendapat bahwa indikator yang tercakup di dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia. Tidak hanya itu, mereka terus melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM.

UNDP telah melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010. Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk

menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai **Metode Baru**. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan **Metode Baru**. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi

pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

### **Mengapa Metodologi Penghitungan Diubah?**

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Namun, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM setidaknya ada dua.

**Pertama**, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Capaian AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

**Kedua**, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah.

## **Bagaimana Penerapan Metode Baru di Indonesia?**

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbaiki penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

1. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010-SP2010,Proyeksi Penduduk)
2. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS)
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai. Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga diganti dengan harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti.



Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi.

Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli yang digunakan.

Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

### **2.1.1 Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Secara umum penghitungan IPM masih tetap menggunakan 3 dimensi yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat, Pengetahuan, Standar Hidup Layak. Dari ketiga dimensi tersebut komponen yang diukur adalah :

1. Angka harapan hidup (eo),

2. Rata-rata lama sekolah (MYS= Mean Years of Schooling ) dan Angka harapan lama bersekolah (EYS = Expected Years of Schooling) yang digabung menjadi satu, yakni indeks pendidikan, dan
3. *Purchasing Power Parity (PPP)*/ kemampuan daya beli yang telah disesuaikan.

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga berskor antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{e_0 - e_{0 \min}}{e_{0 \max} - e_{0 \min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{\sqrt{I_{EYS} \times I_{MYS}} - \text{minimum}}{\text{maksimum} - \text{minimum}}$$

$$I_{EYS} = \frac{EYS - EYS_{\min}}{EYS_{\max} - EYS_{\min}}$$

$$I_{MYS} = \frac{MYS - MYS_{\min}}{MYS_{\max} - MYS_{\min}}$$

$$I_{\text{daya beli}} = \frac{\ln(\text{daya beli}) - \ln(\text{daya beli}_{\min})}{\ln(\text{daya beli}_{\max}) - \ln(\text{daya beli}_{\min})}$$

Tabel 2.1  
 Nilai Minimum dan Maksimum Penghitungan Indikator IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	20	83,4	83,4
<i>Expected Years of Schooling</i>	Tahun	0	0	18	18
<i>Mean Years of Schooling</i>	Tahun	0	0	13,1	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (IDR)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352** (IDR)

Keterangan:

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

\*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan Hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Tabel 2.2  
Perbedaan Penghitungan IPM Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS*
<b>Kesehatan</b>	Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )	Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )	Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )	Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )
<b>Pengetahuan</b>	1. Angka Melek Huruf	1. Angka Melek Huruf	1. <i>Expected Years of Schooling</i>	1. <i>Expected Years of Schooling</i> (7 Thn+)
	2. Kombinasi APK	2. <i>Mean Years of Schooling</i>	2. <i>Mean Years of Schooling</i>	2. <i>Mean Years of Schooling</i> (25 Thn+)
<b>Standar Hidup Layak</b>	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan
<b>Agregasi</b>	<b>Rata-rata Hitung (Aritmatik)</b> $IPM = \frac{1}{3}(I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pengetahuan}} + I_{\text{daya}})$		<b>Rata-rata Ukur (Geometrik)</b> $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pengetahuan}} \times I_{\text{daya}}}$	

### 2.1.2 Penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- 2) pengetahuan (*knowledge*); dan
- 3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi

pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator diatas dihitung berdasarkan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun keatas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun keatas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk perempuan dan laki-laki.

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen.

Tabel 2.3  
 Nilai Minimum dan Maksimum Penghitungan Indikator IPG

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup	Tahun	22,5	27,5	82,5	87,5
<i>Expected Years of Schooling</i>	Tahun	0	0	18	18
<i>Mean Years of Schooling</i>	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp.	1.007.436		26.572.352	

Pada dasarnya metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender hampir sama dengan penghitungan indeks-indeks yang lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia. Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender, komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Parameter dimasukkan dalam rumus untuk memperhitungkan tingkat penolakan terhadap ketimpangan. Parameter ini menunjukkan elastisitas marginal dari penafsiran sosial terhadap pencapaian antar kelompok gender yang berbeda.

Penyusunan Indeks masing-masing Indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\text{min})})}{(X_{(i-\text{maks})} - X_{(i-\text{min})})}$$

Dimana :  $X_{(i,j)}$  = Indeks Komponen ke i

$X_{(i-\text{maks})}$  = Nilai Maksimum Komponen

$X_{(i-\text{min})}$  = Nilai Minimum Komponen

Khusus indeks pendidikan, karena terdapat dua komponen (MYS dan EYS) maka dihitung nilainya dengan menggunakan rata-rata aritmatik yaitu:

$$X_{pendidikan} = \frac{X_{p1} + X_{p2}}{2}$$

Langkah selanjutnya adalah menghitung IPM perempuan dan laki-laki. Metode agregasi yang digunakan untuk mendapatkan angka IPM perempuan dan laki-laki sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM \text{ laki-laki} = \sqrt[3]{I_{kesehatan L} \times I_{pengetahuan L} \times I_{daya beli L}}$$

$$IPM \text{ Perempuan} = \sqrt[3]{I_{kesehatan P} \times I_{pengetahuan P} \times I_{daya beli P}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antar dimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antar dimensi. Pada metode baru, penghitungan angka indeks pembangunan gender tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_p}{IPM_l}$$

Jadi Indeks Pembangunan Gender merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap laki-laki. Angka ini menunjukkan rasio antara capaian pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

### 2.1.3 Penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disusun berdasarkan tiga komponen. Tiga komponen penyusun IDG adalah : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP (*Equally Distributed Equivalent Percentage*) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya indeks dari masing-masing komponen adalah nilai EDEP nya dibagi 50, karena 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

$$IDG = 1/3 [ I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis} ]$$

Dimana :  
 $I_{par}$  : Indeks keterwakilan di parlemen  
 $I_{DM}$  : Indeks pengambilan keputusan  
 $I_{inc-dis}$  : Indeks distribusi pendapatan

Penghitungan ketiga indeks komponen IDG tersebut caranya sama, sebagai misal penghitungan indeks keterwakilan di parlemen ( $I_{par}$ ) :



$$I_{\text{par}} = \text{EDEP}(\text{par}) / 50$$

$$\text{EDEP}(\text{par}) = \left( P_f X_f \frac{(1-\epsilon)}{1/(1-\epsilon)} + P_m X_m \frac{(1-\epsilon)}{1/(1-\epsilon)} \right)$$

Dimana :

$X_f$  : Keterwakilan perempuan di parlemen

$X_m$  : Keterwakilan laki-laki di parlemen

$P_f$  : Proporsi Populasi Perempuan

$P_m$  : Proporsi Populasi Laki-laki

$\epsilon$  : Parameter penolakan ketimpangan (=2)

## 2.2 Metode Analisis

Dalam penyusunan buku ini metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif karena tidak ada pengujian secara statistik di dalamnya. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data yang memberikan informasi yang berguna. Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

## 2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan buku ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta data dari Dinas/ Instansi serta beberapa referensi terkait yang berkaitan dengan penulisan ini.

## 2.4 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan yang dilakukan adalah pada tahun 2018. Sehingga data yang disajikan merupakan cerminan kondisi tahun 2017

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN GENDER**

#### **3.1 Ketentuan Penting**

##### **1. Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 27)**

Wanita dan pria memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan.

##### **2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984**

Pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

##### **3. UU No.1/1989 : Sistem Pendidikan Nasional**

Wajib belajar 9 tahun dimulai dari tahun 1994.

Orang tua dianjurkan menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan SLTP.

##### **4. UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan**

Kewajiban pengusaha untuk memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap tenaga kerja.

Larangan bagi pengusaha mempekerjakan wanita untuk pekerjaan di bawah tanah dan tempat kerja yang membahayakan keselamatan, kesehatan, kesusilaan dan tidak sesuai kodrat dan harkat pekerja wanita.

Larangan bagi pengusaha mempekerjakan wanita yang sedang hamil dan atau sedang menyusui di malam hari.

Pengusaha tidak boleh mewajibkan bekerja kepada wanita waktu haid hari pertama dan kedua.

Pengusaha harus memberikan kesempatan bagi pekerja wanita yang menyusui di jam kerja.

## **5. GBHN 1999 (TAP/IV/MPR/1999)**

Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender.

Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

## **6. UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Hak wanita dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Hak kewarganegaraan seorang wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing.

Hak wanita untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan.

Hak wanita untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

Hak wanita dewasa dan atau telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

Persamaan hak dan kewajiban istri/suami dalam kehidupan perkawinan.

Persamaan hak dan kewajiban mantan istri/suami setelah putusya perkawinan terhadap anak dan harta benda.

## **7. Kepres RI No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.**

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bertujuan:

Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia.

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.

#### **8. Inpres Nomor 9 Tahun 2000**

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menegaskan agar dalam seluruh proses pembangunan di berbagai tingkat dan sektor, perempuan diikutsertakan secara seimbang dengan laki-laki.

Secara teknis ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2004.

#### **9. UU RI No. 23 Tahun 2005, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga.**

Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumahtangga yang kebanyakan korban adalah perempuan.

Penghapusan kekerasan dalam rumahtangga dilaksanakan berdasarkan asas: penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan Gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.

#### **10 Perjanjian Antar Negara Yang Disetujui Untuk Dilaksanakan di Indonesia.**

Perjanjian tentang persamaan upah/gaji wanita dan pria untuk pekerjaan yang sama (Jenewa), disetujui dengan UU No. 80 Tahun 1957.

Perjanjian tentang hak politik untuk wanita (New York) disetujui dengan UU No. 68 Tahun 1958.

Perjanjian tentang penghapusan segala bentuk perbedaan terhadap wanita, disetujui dengan UU N0. 7 Tahun 1984.

### **3.2 Beberapa Fakta Sejarah**

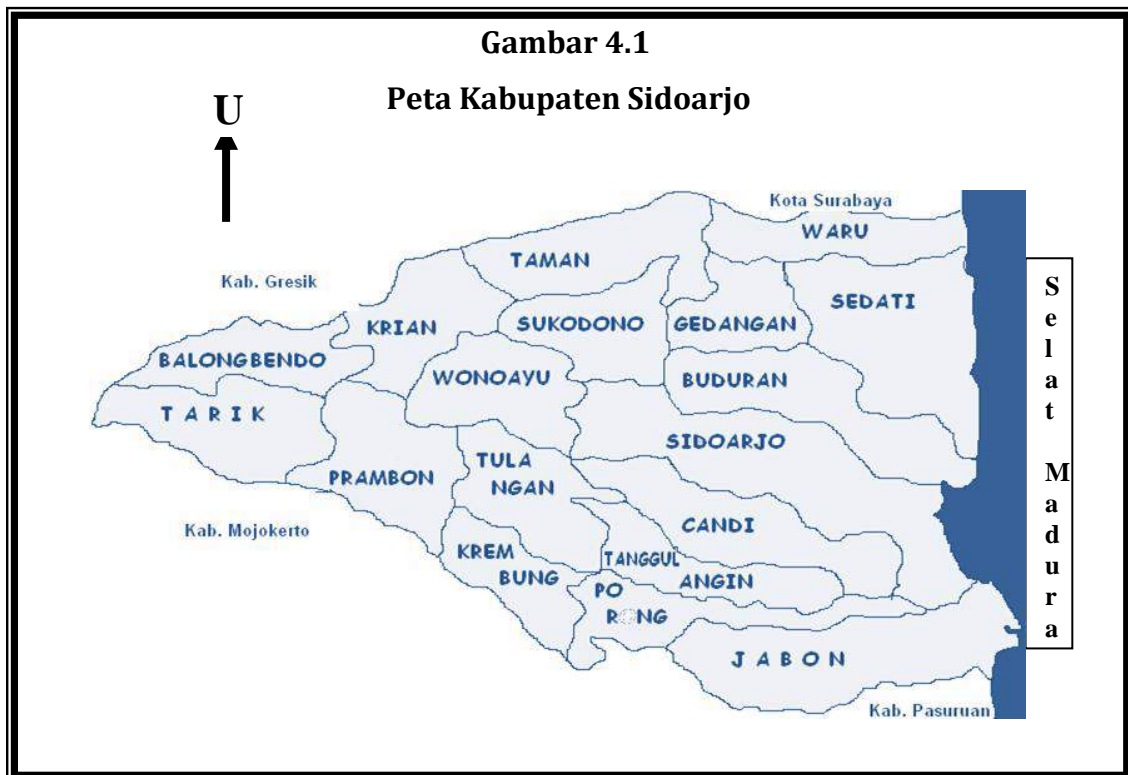
1. 1928; Kongres Wanita I, Pembentukan Perikatan Perkoempoelan Kaoem Wanita Perempoean Indonesia yang bernama KOWANI.
2. 1968; Lahirnya KNKWI (Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia) yang bertugas menangani peningkatan peranan wanita.

3. 1978; Program peningkatan peranan wanita untuk pertama kali resmi masuk GBHN.
4. 1978; Pembentukan Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (UPW).
5. 1983; Peningkatan Status dari Menteri Muda UPW menjadi Menteri Negara UPW yang kemudian berubah namanya menjadi Menteri Negara Peranan Wanita (Memperta) tahun 1998.
6. 1999; Memperta berubah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

## BAB IV KONDISI WILAYAH

### 4.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Sidoarjo terletak di Pulau Jawa pada posisi 112°5" hingga 112°9" Bujur Timur dan 7°3" hingga 7°5" Lintang Selatan. Kabupaten Sidoarjo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gresik Dan Kota Surabaya. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.



Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan sebutan **Kota Delta** karena wilayahnya merupakan bentukan asal *fluvial* yaitu bentukan wilayah yang didominasi oleh proses sedimentasi yang berasal dari Kali Porong dan Kali Surabaya. Dengan karakteristik *geomorfologi* seperti itu wilayah delta merupakan tempat yang subur dan sangat ideal untuk mengembangkan kehidupan.

Dari aspek *klimatologi*, wilayah ini memiliki kisaran suhu antara 20<sup>0</sup>-35<sup>0</sup> Celcius, dengan pembagian musim hujan pada bulan Mei – Oktober dan kemarau pada bulan Nopember-April. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 714.243

Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 kecamatan dan terbagi habis menjadi 322 desa dan 31 kelurahan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah 80.998 Km<sup>2</sup> dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Gedangan dengan luas wilayah 24.058 Km<sup>2</sup>

## **4.2 Sejarah Kabupaten Sidoarjo**

Sejak tahun 1851 Sidoarjo masih dinamakan Sidokare sebagai bagian dari daerah Kabupaten Surabaya, Sidoarjo atau Sidokare pada masa itu dipimpin oleh seorang Patih yang bernama R. Ng. Djojohardjo yang bertempat tinggal di kampung Pucang Anom dan dibantu oleh seorang Wedono bernama Bagus Ranuwirjo yang bertempat tinggal di kampung Pegabahan.

Dengan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9 / 1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, Daerah Kabupaten Surabaya dipersempit dan dibagi menjadi dua yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare.

Untuk Kabupaten Sidokare mulai tahun 1859 diangkat seorang Bupati bernama R.T. Notopuro (R.T.P. Tjokronegoro I) yang berasal dari Kasepuhan putera R.A.P. Tjokronegoro (Bupati Surabaya). Pusat pemerintahan Sidokare kala itu berada di kampung Pandean, tepatnya sekarang sebelah selatan pasar lama, sedangkan alun – alunnya sekarang telah menjadi jalan pasar lama. Dalam masa pemerintahannya R.T. Notopuro (R.T.P. Tjokronegoro I) juga pernah membangun Masjid yang sekarang dikenal dengan sebutan Masjid Kauman. Kemudian dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 10 / 1859 tanggal 28 Mei 1859 Staatsblad No. 32, nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo. Pada akhirnya setiap tahunnya pada tanggal 31 Januari diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 1895 Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 6 Kawedanan ( Distrik ).

1. Jenggolo I = Kawedanan ( Distrik ) Gedangan
2. Jenggolo II = Kawedanan ( Distrik ) Sidoarjo
3. Jenggolo III = Kawedanan ( Distrik ) Krian
4. Jenggolo IV = Kawedanan ( Distrik ) Taman
5. Rawapulo I = Kawedanan ( Distrik ) Porong
6. Rawapulo II = Kawedanan ( Distrik ) Bulang

Tabel 4.1.  
Daftar Nama-Nama Bupati Sidoarjo Tahun 1859 – 2017.

No	Nama Lengkap	Masa (tahun) Pemerintahan	Keterangan
1	R.T.P Tjokronegoro I	1859 – 1863	
2	R.T.A.A. Tjokronegoro II	1863 – 1883	
3	R.T. Sumodirejo	1883	Hanya 3 bulan, wafat
4	R.A.A.P. Tjondronegoro I	1883 – 1906	
5	R.A.A Tjondronegoro II	1906 – 1924	
6	Kosong	(1924 – 1926)	2 tahun – kosong
7	R.T.A Smodiputro	1926 – 1932	
8		1932 – 1933	1 tahun – kosong
9	R.A.A. Sujadi	1933 – 1947	Belanda – Jepang – RI
10	Pemerintahan Belanda recomba	(1946 – 1949)	Pemerintahan Belanda recomba
11	K.Ng. Subakti Pusponoto	1947 – 1949	
12	R. Suharto	1949 – 1950	
13	R. Sriadi Kertosuprojo	1950 – 1958	
14	a) R.H. Samadikoen (Bupati)	1958 – 1959	UU No. I / 1957
15	A.Qodari Amir (Kepala Daerah)	1958 – 1959	
16	b) R.H. Aamadikoen (Bupati, KDH)	1959 – 1964	Penpres No. 6 / 1959 (disempurnakan)
14	Kosong	1964- 1965	1 tahun – kosong
15	Kol. Pol. H.R. Soedarsono	1965 – 1975	
16	Kol. Pol. H. Soewandi	1975 – 1980	2 periode
17	Kol. Pol. H. Soewandi	1980 -1985	
18	Kol. Art. H. Soegondo	1985 – 1990	
19	Kol. Inf. Edhi Sanyoto	1990 – 1995	
20	Kol. Inf. H. Soedjito	1995 – 2000	
21	Drs. H. Win Hendrarso, M.Si	2000 – 2006	2 periode
22	Drs. H. Win Hendrarso, M.Si	2006 - 2010	
23	H. Syaiful Ilah, SH, M.Hum.	2010 - Sekarang	

Ternyata nama-nama kawedanan tersebut di atas masih memakai nama-nama dulu waktu masa kerajaan Jenggolo, nama-nama ini mulai hilang kira-kira pada tahun 1902. Gedangan lalu menjadi Kecamatan dan dimasukkan dalam Kawedanan Taman, Bulang kira-kira tahun 1920 baru disatukan dengan Krian. Jumlah Kecamatan lebih banyak dari pada sekarang dan dengan sendirinya daerahnya menjadi lebih kecil, umpamanya di Kota Sidoarjo saja ada Kecamatan Kemambang, Kecamatan Jasem, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Suko.



### 4.3 Kondisi Sosial Budaya

Jika dilihat dari letaknya yang berbatasan langsung dengan ibu kota propinsi yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang cukup strategis sebagai daerah industri dan perdagangan. Potensi sumber daya perikanan yang melimpah juga memungkinkan wilayah Sidoarjo berkembang sebagai daerah pertambakan. Hal ini dituangkan dalam 3 (tiga) *zone* yang ditetapkan yaitu zona sentra industri/permukiman yang berada di wilayah bagian tengah yang berada di ketinggian 3-10 meter dpl dan memiliki sumber air tawar cukup besar. Wilayah ini mencapai 40,81% dari seluruh wilayah. Zona pertambakan berada di ketinggian 0-3 meter dpl di wilayah bagian timur yang mencapai 29,99 persen dari keseluruhan luas. Sedangkan zona pertanian yang berada di bagian barat memiliki ketinggian 10-25 meter dpl mencapai 29,20 persen dari seluruh luas wilayah. Dengan demikian jelas terlihat bahwa potensi industri memiliki peluang besar untuk berkembang di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mendukung perkembangan spasial wilayah Sidoarjo, maka arahan struktur ruang menggunakan sistem cluster dimana dalam keterkaitan pengelolaan ruangnya tidak dapat dipisahkan dari wilayah di sekitarnya, sehingga dalam menentukan pusat pelayanan, orientasinya tidak dapat terkooptasi oleh batas administrasi namun harus memperhatikan keterhubungan secara struktural dengan penataan ruang di sekitarnya.

Prinsip-prinsip penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo yaitu sumbernya di (<http://Sidoarjo.Sytes.net./bappekab/02-info-terbaru/makalah.doc>) :

1. Kawasan industri yang ditetapkan, dalam bentuk *industrial estate*, secara struktural dipisahkan dengan kawasan permukiman.
2. Untuk membatasi kawasan padat dekat industri atau perkotaan dengan kawasan rural, maka beberapa kawasan pertanian diarahkan untuk tetap dipertahankan sebagai sabuk hijau (*green belt*).
3. Ditetapkan kawasan inti dan kawasan rural. Kawasan perkotaan inti adalah perkotaan yang ditetapkan untuk berkembang lebih pesat. Sedangkan kawasan rural adalah kawasan yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian.

Perkotaan Sidoarjo termasuk dalam kategori Kota Metropolitan, bersama-sama dengan Surabaya Metropolitan Area (SMA) dapat menampung penduduk hingga 5 juta jiwa. Perkotaan Surabaya Metropolitan Area yang dimaksud meliputi penyatuan Perkotaan Surabaya, Perkotaan Gresik, Perkotaan Bangkalan dan Perkotaan Sidoarjo. Melihat dari ukuran perkotaannya termasuk hierarki I dalam sistem kota-kota di Jawa Timur.

Memperhatikan keterkaitan kegiatan dengan kegiatan yang berkembang di Surabaya dan skala kegiatan yang ada, Sidoarjo yang menjadi bagian dari SMA diarahkan untuk mendukung fungsi dan peran sebagai pusat kegiatan nasional, yaitu:

- Pusat pemerintahan
- Jasa Perdagangan
- Pendidikan
- Industri
- Pertanian
- Perikanan Tambak
- Pariwisata
- Perumahan

Pengembangan Kabupaten Sidoarjo mengalami sedikit gangguan sejak terjadinya bencana Banjir Lumpur Lapindo. Banjir Lumpur Panas Sidoarjo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan (Tanggulangi, Jabon, Porong), serta mempengaruhi aktivitas perekonomian khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan secara luas di Jawa Timur.

Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dominan beragama Islam, memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat terutama lingkungan sosial budaya masyarakat yang lebih condong pada budaya religius Islam, seperti corak budaya pada peringatan maulid Nabi Muhammad Saw yang ditandai dengan muludan berupa lelang bandeng & budaya nyadran bagi masyarakat pesisir pada kalender Islam pada bulan-bulan tertentu. Hampir di semua wilayah Kabupaten Sidoarjo

baik di perkotaan maupun pedesaan dengan mudah ditemukan tempat ibadah seperti masjid dan mushola.

## **BAB V**

### **DEMOGRAFI**

Penduduk mempunyai peran ganda dalam konteks pembangunan yaitu merupakan subyek sekaligus obyek. Di satu sisi tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (penduduk), sedangkan di sisi lain tersedianya sumber daya manusia (SDM)/penduduk yang cukup, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan salah satu komponen utama dalam proses pembangunan itu sendiri.

Pemasalahan kependudukan tidak lepas dengan pemasalahan ketersediaan pangan serta daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan dan berbagai permasalahan sosial ekonomi lainnya. Dibutuhkan perencanaan kependudukan yang tepat dan benar agar pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Keberadaan data atau informasi dasar tentang penduduk mutlak dibutuhkan dalam keseluruhan proses pembangunan. Beberapa dari informasi kependudukan tersebut antara lain mengenai jumlah, kepadatan, pertumbuhan, rasio jenis kelamin, struktur umur, fertilitas, mortalitas dan migrasi.

#### **5.1 Rasio Jenis Kelamin**

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan banyaknya laki-laki dengan perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 (hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010) sebesar 2.183.682 jiwa yang terdiri 1.097.094 laki-laki dan 1.086.588 perempuan dengan rasio jenis kelaminnya sebesar 100,96 persen.

Dari tabel 5.1 terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 adalah sebesar 100,97. Hal ini memberikan gambaran bahwa menurut jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo penduduk perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki.

**Tabel 5.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Tahun 2015 - 2017.**

<b>Kelompok Umur (Tahun)</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ratio Jenis Kelamin</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	1.063.629	1.053.650	2.117.279	100,95
2016	1.080.401	1.070.081	2.150.482	100,96
2017	1.097.094	1.086.588	2.183.682	100,97

*Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2017*

Apabila dilihat dalam kelompok umur anak (0-14 tahun), dewasa (15-64 tahun) dan tua (65 tahun ke atas) ada kecenderungan bahwa semakin tinggi kelompok umur, rasio jenis kelamin semakin rendah. Seperti yang terlihat pada tabel 5.2 rasio jenis kelamin pada kelompok usia 0-14 tahun sebesar 105,78 persen sedangkan 15-64 tahun 100,82 persen dan kelompok umur 65 tahun keatas sebesar 79,32 persen.

**Tabel 5.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017.**

<b>Kelompok Umur (Tahun)</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ratio Jenis Kelamin</b>
0 - 14	268.317	254.152	522.469	105,57
15 - 64	783.462	777.036	1.560.498	100,83
65 +	45.315	55.400	100.715	81,80
Jumlah	1.097.094	1.086.588	2.183.682	100,97

*Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2017*

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kecenderungannya banyak anak-anak yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki. Namun dalam perjalanan waktu banyak sekali laki-laki yang tidak mencapai usia di atas 65 tahun. Hal ini terlihat

dari sex ratio pada kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 81,80 persen, yang berarti ada sebanyak 82 laki-laki tiap 100 perempuan.

## 5.2 Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk dalam analisis demografi dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, di bawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, usia 15 – 64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas. Struktur umur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk umur muda sebanyak 40% atau lebih, sementara kelompok umur tua kurang atau sama dengan 5%. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua apabila kelompok umur mudanya sebanyak 30% atau kurang sementara kelompok umur tuanya lebih besar atau sama dengan 10%.

**Tabel 5.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 - 2017.**

Kelompok Umur (Tahun)	2016				2017			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0 - 14	266.990	252.644	519.634	24,16	268.317	254.152	522.469	23,93
15 - 64	770.434	764.020	1.534.454	71,35	783.462	777.036	1.560.498	71,46
65 +	42.977	53.417	96.394	4,48	45.315	55.400	100.715	4,61
Jumlah	1.080.401	1.070.081	2.150.482	100,00	1.097.094	1.086.588	2.183.682	100,00

*Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2017.*

Pada Tabel 5.3 terlihat bahwa pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Sidoarjo berada pada posisi pertengahan/masa transisi dari kategori penduduk muda ke penduduk tua dimana persentase penduduk 0-14 tahun sebesar 23,93 persen dan persentase penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 4,61 persen. Ada indikasi penurunan persentase pada penduduk usia di bawah 15 tahun dibanding tahun 2016.

Penduduk usia dewasa atau produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Sidoarjo lebih dari 70 persen dengan komposisi laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan. Besarnya penduduk usia produktif membawa konsekuensi terhadap

kesempatan kerja disamping peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi.

**Tabel 5.4**  
**Angka Ketergantungan Penduduk**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2017.**

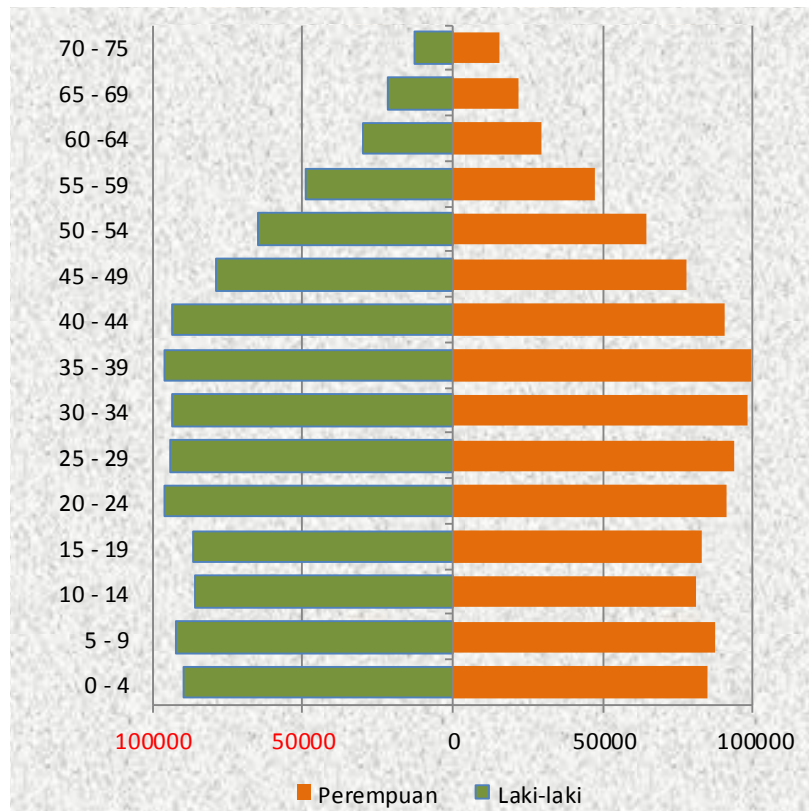
Tahun		Angka Ketergantungan		
		Usia Muda	Usia Tua	Total
2016	L	34,65	5,58	40,23
	P	33,07	6,99	40,06
	L + P	33,86	6,28	40,15
2017	L	34,25	5,78	40,03
	P	32,71	7,13	39,84
	L + P	33,48	6,45	39,93

*Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2017.*

Angka ketergantungan penduduk Sidoarjo tahun 2017 secara umum sebesar 39,93 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 40 penduduk usia tidak produktif. Bila dibandingkan angka ketergantungan antara laki-laki dan perempuan maka terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan angka ketergantungan penduduk perempuan, angka ketergantungan perempuan adalah sebesar 39,84 sedangkan laki-laki sebesar 40,03.

Angka ketergantungan penduduk usia muda sebesar 33,48 persen sedangkan ketergantungan penduduk usia tua sebesar 6,45. Dapat diartikan bahwa tiap 100 penduduk usia produktif menanggung 33 penduduk yang usianya masih muda dan 7 penduduk yang usianya tua.

**Gambar 5.1**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017.**



Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2017.

Piramida penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, menunjukkan pola yang membesar pada tengah dengan sedikit lebih lebar pada umur awal (0-9 tahun). Pola ini memberikan indikasi adanya fertilitas yang sedikit lebih tinggi pada dasawarsa terakhir dibanding dengan periode sebelumnya. Dinamika kependudukan antara kelompok penduduk laki-laki dan perempuan juga menunjukkan perbedaan, dimana jumlah penduduk kelompok usia muda untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan pola ini ternyata berubah ketika kita melihat kelompok umur di atas 65 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kelahiran yang lebih banyak pada jenis kelamin laki-laki dan ada dugaan bahwa *survival rate* awal kehidupan pada jenis kelamin laki-laki lebih tinggi. Untuk kelompok umur di atas 65 tahun jumlah perempuan lebih banyak mengindikasikan angka harapan hidup yang lebih tinggi pada jenis kelamin perempuan.



**Tabel 5.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017.**

<b>Kelompok Umur (Tahun)</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	89.666	85.272	174.938	105,15
5 - 9	92.539	87.679	180.218	105,54
10 - 14	86.112	81.201	167.313	106,05
15 - 19	86.892	83.388	170.280	104,20
20 - 24	96.204	91.233	187.437	105,45
25 - 29	94.451	93.981	188.432	100,50
30 - 34	93.900	98.111	192.011	95,71
35 - 39	95.996	99.849	195.845	96,14
40 - 44	93.452	90.740	184.192	102,99
45- 49	78.781	78.060	156.841	100,92
50 - 54	65.110	64.417	129.527	101,08
55 - 59	48.855	47.464	96.319	102,93
60 - 64	29.821	29.793	59.614	100,09
65 +	45.315	55.400	100.715	81.79,32
<b>Jumlah</b>	<b>1.097.094</b>	<b>1.086.588</b>	<b>2.183.682</b>	<b>100,97</b>

*Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2017*

## **BAB VI**

### **PENDIDIKAN**

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tingkat pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). SDM dengan kualitas pengetahuan dan ketrampilan yang cukup diharapkan lebih mendorong akselerasi dari proses pembangun melalui kemampuan penerapan teknologi yang lebih baik maupun pemanfaatan sumberdaya lainnya secara lebih efisien.

Pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan dalam peningkatan SDM. Melalui pendidikan, individu lebih berpeluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya baik secara sosial, intelektual, spiritual maupun profesionalisme. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan bisa dikorelasikan dengan peningkatan kemampuan untuk mengakses informasi, baik terhadap teknologi baru maupun dari kemudahan di sisi pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan. Dampak peningkatan pendidikan diharapkan juga akan menambah daya saing dan posisi tawar tenaga kerja di pasar global.

Hakekat Pendidikan merupakan upaya sadar manusia untuk mengembangkan diri baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah dan baik secara formal maupun non formal yang berlangsung seumur hidup (BPS dan UNFPA, 1999). Program dan kegiatan di bidang pembangunan pendidikan juga harus dapat mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan Gender. Pengurangan paradigma yang ada di masyarakat terkait dengan pengutamaan pendidikan hanya untuk salah satu Gender terus menjadi tantangan pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

#### **6.1 Partisipasi Sekolah**

Pemerintah telah mencanangkan program Wajib Belajar (Wajar) mulai program wajib belajar tingkat SD (wajar 6 tahun), tingkat SLTP (wajar 9 tahun) dan saat ini sudah dimulai Wajar 12 tahun (setingkat SLTA).

Demi lancarnya pelaksanaan program Wajar tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program penunjang antara lain pemberian berbagai macam beasiswa, Program Keluarga harapan (PKH) dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk sekolah setingkat SLTA. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah akan pentingnya

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

**Tabel 6.1**  
**Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Kelompok Usia Sekolah, Tahun 2017.**

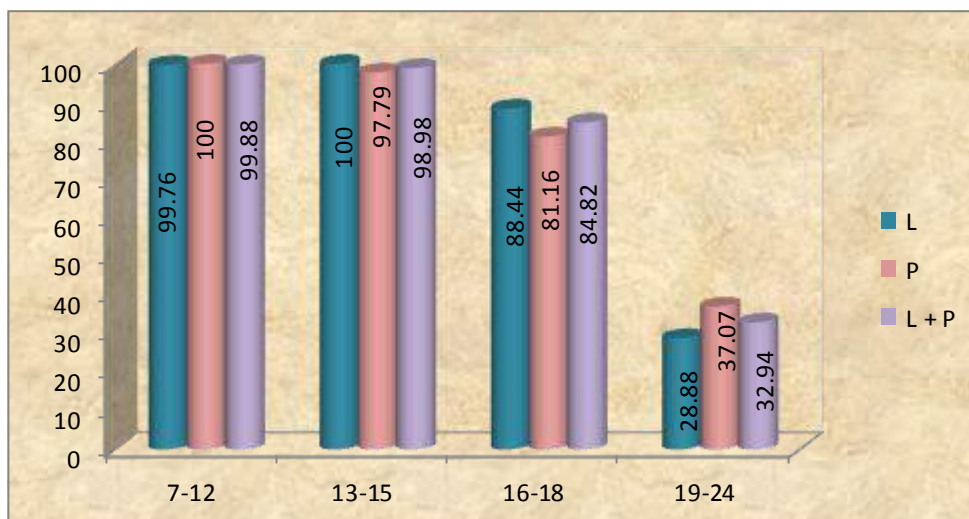
Kelompok Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
7-12	99,76	100,00	99,88
13-15	100,00	97,79	98,98
16-18	88,44	81,16	84,82
19-24	28,88	37,07	32,94

*Sumber : Susenas Tahun 2017*

Tingkat keberhasilan program pendidikan antara lain bisa tercermin dari tingginya angka partisipasi sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah dengan jumlah total penduduk pada suatu kelompok usia sekolah. Kelompok usia sekolah dalam hal ini dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok usia 7-12 tahun (usia SD), 13-15 tahun (usia SLTP), 16-18 tahun (usia SLTA) dan kelompok usia 19-24 tahun (usia perguruan tinggi). Sebagai ilustrasi, angka partisipasi Sekolah Dasar (SD) adalah rasio antara anak usia 7-12 tahun yang masih sekolah dengan total jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Pada tabel 6.1 terlihat bahwa angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 – 15 tahun (usia sekolah sampai dengan SLTP) belum mencapai 100 persen. Meskipun demikian program Wajib 9 tahun (setingkat SLTP) relatif cukup berhasil. Perbedaan angka partisipasi sekolah hampir di semua kelompok usia sekolah antara perempuan dan laki-laki relatif kecil, bahkan pada jenjang sekolah perguruan tinggi (usia 19-24 tahun) angka partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa paradigma di masyarakat untuk mengutamakan gender tertentu di bidang pendidikan sudah sangat berkurang (Gambar 6.1).

**Gambar 6.1.**  
**Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Usia Sekolah**  
**Tahun 2017**



## 6.2 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu dasar utama bagi seseorang dalam upayanya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan adalah kemampuan membaca dan menulis atau disebut juga dengan “Melek Huruf”. Hal ini dikarenakan sebagian besar informasi dan ilmu pengetahuan disajikan melalui media cetak/tulisan seperti buku ilmiah, buku pelajaran, koran, majalah dan sebagainya.

Indikator pendidikan dalam penghitungan indek pembangunan Gender diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf atau kemampuan membaca dan menulis diberi bobot dua kali lipat dibandingkan indikator rata-rata lama sekolah. Ini menunjukkan kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dengan kemampuan ini seseorang akan lebih mudah menerima pembelajaran/pembaharuan.

Angka melek huruf mencerminkan kemampuan membaca dan menulis baik dalam bentuk huruf latin dan atau huruf lainnya (arab, cina, jawa dll). Pada tahun 2017 terlihat bahwa persentase buta huruf perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki seperti terlihat dalam tabel 6.2.

**Tabel 6.2**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Kemampuan Membaca Dan Menulis**  
**Tahun 2017.**

<b>Kemampuan Baca Tulis</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-Laki dan Perempuan</b>
Dapat Membaca dan Menulis (Huruf latin dan atau huruf lainnya)	99,41	97,90	98,66
Tidak Dapat Baca Tulis	0,59	2,10	1,34
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Susenas Tahun 2017*

Masih diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk memperkecil angka buta huruf terutama pada perempuan usia-produktif. Tingkat melek huruf orang tua dan perempuan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Pemenuhan hak pokok anak sejak anak itu dalam kandungan akan tercukupi oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya dengan adanya kemampuan dan kesempatan yang lebih baik dalam mengakses informasi tertulis.

**Tabel 6.3**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Buta Huruf**  
**Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015 - 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
2017	0,59	2,10
2016	0,53	1,88
2015	0,69	1,85

*Sumber : Susenas Tahun 2017*

Dari Tabel 6.2 terlihat bahwa penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta huruf sekitar 2,10 persen, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 0,59 persen. Demikian juga jika dilihat data 3 tahun terakhir memperlihatkan persentase penduduk perempuan yang buta huruf masih lebih tinggi daripada penduduk laki-laki (tabel 6.3). Secara umum persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf sudah sangat tinggi. Meskipun terlihat ada sedikit penurunan persentase melek huruf namun relatif tidak terlalu signifikan.

Mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo bisa menjadi salah satu faktor penyebab adanya sedikit pergerakan angka melek huruf di Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan tujuan keempat SDGs, meraih pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua menegaskan kembali keyakinan bahwa pendidikan adalah salah satu alat paling kuat dan terbukti bagi berlangsungnya pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini memastikan semua anak perempuan dan laki-laki bisa menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah bebas biaya pada tahun 2030. Selain itu, tujuan ini juga menargetkan penyediaan akses pada pelatihan kejuruan yang terjangkau, serta menghilangkan kesenjangan gender dan kekayaan, demi mencapai akses universal pada pendidikan tinggi berkualitas. Salah satu evaluasi dari keberhasilan pemerintah dalam memberikan pendidikan berkualitas pada pembangunan berkelanjutan 2030 dengan mengamati pencapaian angka melek huruf penduduknya.

### **6.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan**

Indikator pendidikan yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan selain angka melek huruf adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan dianggap bisa mencerminkan tingkat intelektualitas penduduknya. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan bisa diasosiasikan dengan semakin baik juga kemampuan dan wawasan seseorang. Definisi yang digunakan untuk tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pada sekolah formal.

**Tabel 6.4**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut**  
**Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Tahun 2017.**

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
1.	Tidak Punya Ijazah	10,53	13,72	12,12
2.	SD/MI	16,00	18,26	17,13
3.	SLTP Sederajat	19,89	22,45	21,16
4.	S M U Sederajat	28,35	27,30	27,83
5.	S M K Sederajat	13,26	7,20	10,23
6.	D1/D2/D3	2,55	2,96	2,75
7.	DIV/S1	8,25	7,67	7,96
8.	S2/S3	1,18	0,44	0,81
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Susenas Tahun 2017*

Pada tabel 6.4, bisa dilihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Sidoarjo baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar adalah SLTA sederajat, yaitu sebesar 38,06 persen (SMU Sederajat 27,83 persen dan SMK Sederajat 10,23 persen). Untuk laki-laki, persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SLTA sederajat sebesar 41,61 persen sedangkan perempuan sebesar 34,50 persen.

## **BAB VII**

### **KESEHATAN**

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting untuk peningkatan produktifitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh akses atas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap berbagai layanan kesehatan termasuk kecukupan tenaga medis menjadi faktor penting pada tercapainya kualitas kesehatan masyarakat yang cukup.

Peningkatan kesehatan perempuan merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan tujuan SDGs. Ada tiga tujuan pembangunan yang terkait langsung dengan kesehatan perempuan, yaitu meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan angka kematian anak dan memerangi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit menular lainnya pada tahun 2030. Tujuannya adalah untuk meraih layanan kesehatan dengan cakupan universal dan menyediakan akses menuju obat-obatan dan vaksin yang efektif serta aman bagi semua.

Kualitas hidup perempuan sebetulnya merupakan kondisi dasar yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas generasi penerusnya. Kualitas kesehatan ibu yang cukup pada gilirannya akan menghasilkan anak yang tumbuh kembangnya juga sempurna. Tingkat kesehatan pada masa kehamilan, balita dan anak-anak akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental, sedangkan pada masa mereka dewasa dan lansia akan berpengaruh pada tingkat aktivitas dan produktivitasnya.

#### **7.1 Keluhan Kesehatan dan Gangguan Sakit**

Keluhan kesehatan adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal, atau hal lain. Indikator adanya keluhan kesehatan masyarakat akan memberikan informasi awal terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Indikator lanjutan yang juga layak untuk diperhatikan adalah adanya gangguan sakit atau gangguan aktifitas sehari-hari dari adanya keluhan kesehatan tersebut hingga durasi/lamanya keluhan. Lamanya terganggu tidak merujuk pada



keluhan yang terberat saja, melainkan mencakup jumlah hari untuk semua keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir.

**Tabel 7.1**  
**Persentase Penduduk Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan**  
**Menurut Jenis Kelamin , Tahun 2016 - 2017.**

Jenis Kelamin	2016		2017	
	Mempunyai Keluhan		Mempunyai Keluhan	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Laki-Laki	28,62	71,38	24,84	75,16
Perempuan	31,35	68,65	28,36	71,64
<b>Laki-laki + Perempuan</b>	<b>29,98</b>	<b>70,02</b>	<b>26,59</b>	<b>73,41</b>

Sumber : Susenas Tahun 2017

Dari tabel 7.1 terlihat bahwa penduduk Kabupaten Sidoarjo yang mengalami adanya keluhan kesehatan antara tahun 2014 dan tahun 2017 secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Persentase adanya keluhan kesehatan terlihat relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu masing-masing sebesar 27,89 persen dan 70,40 persen atau bisa dikatakan diantara 100 penduduk sekitar 27-29 diantaranya mengalami keluhan kesehatan periode sebulan yang lalu.

**Tabel 7.2**  
**Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut**  
**Jenis Kelamin Dan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari, Tahun 2017.**

Jenis Kelamin	Menyebabkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari	Tidak Menyebabkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari	Jumlah Total
Laki-Laki	44,25	55,75	100,00
Perempuan	49,72	50,28	100,00
<b>Laki-laki + Perempuan</b>	<b>47,15</b>	<b>52,85</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Susenas Tahun 2017

Tabel 7.2 memperlihatkan informasi mengenai ada tidaknya gangguan sakit terhadap penduduk yang mengalami kesehatan dan mengganggu kegiatan sehari-hari (bekerja, sekolah dan kegiatan sehari-hari lainnya). Terlihat dari Tabel 7.2 tersebut bahwa persentase perempuan yang mengalami gangguan kesehatan dan menyatakan adanya gangguan kegiatan sehari-hari cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Kondisi tersebut mengindikasikan antara lain masih perlunya peningkatan pengetahuan serta penanganan kesehatan yang lebih fokus pada keseimbangan Gender. Secara umum persentase keluhan kesehatan yang berakibat pada terganggunya kegiatan sehari-hari masih relatif tinggi atau dengan kata lain masih diperlukan upaya lebih pada peningkatan kesehatan masyarakat.

**Tabel 7.3**  
**Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Kelamin Dan Jumlah Hari Sakit, Tahun 2017.**

<b>Jumlah Hari Sakit (Hari)</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
< 4	66,43	63,55	64,82
4 – 7	22,60	23,18	22,93
8 – 14	6,78	7,91	7,41
15-21	0,99	2,09	1,61
22-30	3,19	3,27	3,24
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Susenas Tahun 2017*

Jika dilihat persentase jumlah hari sakit, sebagian besar dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mempunyai jumlah hari sakitnya kurang dari 4 hari yaitu sekitar 64,82 persen dan 22,93 persen mempunyai jumlah hari sakit sampai dengan 7 hari. Karakteristik persentase lama hari sakit antara laki-laki dan perempuan relatif sama. Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian yang cukup dari sektor terkait utamanya kesehatan, mengingat keterkaitan antara kesehatan dan produktifitas terutama pada angkatan kerja.

## 7.2 Keluarga Berencana

Laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam rumah tangga mengenai hal kesehatan keluarga termasuk dalamnya masalah keterlibatan pada program keluarga berencana. Keputusan penggunaan alat kontrasepsi semestinya merupakan keputusan bersama antar suami dan isteri. Penggunaan alat/cara KB secara efektif, selain bermanfaat untuk membatasi jumlah anak yang dilahirkan juga dapat mengatur jarak kelahiran antar anak, yang pada gilirannya kondisi ini diharapkan akan berdampak pada tingkat kesehatan ibu dan anak yang lebih baik.

**Tabel 7.4**  
**Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi, Tahun 2017.**

Penggunaan alat kontrasepsi	Persentase
Sedang Menggunakan	61,35
Tidak Menggunakan Lagi	11,22
Tidak Pernah Menggunakan	27,43
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

*Sumber: Susenas Tahun 2017*

Pada tabel 7.4 terlihat bahwa wanita yang berstatus kawin yang pernah menggunakan KB sebesar 72,57 persen ( 61,35 persen diantaranya sedang menggunakan alat kontrasepsi) sedangkan sebanyak 27,43 persen tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Informasi masih tingginya persentase wanita berstatus kawin yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi ini memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya faktor yang disebabkan kurangnya akses pada pelayanan keluarga berencana yang menjadi program nasional untuk mengurangi tingginya tingkat kelahiran.

Penggunaan alat kontrasepsi lebih didominasi pada perempuan, terlihat dari jenis alat KB yang paling banyak digunakan (lihat Tabel. 7.5). Secara total sebesar 94,26 persen merupakan alat KB untuk perempuan dimana diantaranya jenis KB suntik sebesar 49,52 persen, IUD/Spiral sebesar 10,50 persen, Pil KB 25,76 persen, MOW 6,38 dan susuk KB sebesar 2,10 persen.

Tingginya persentase jenis KB Suntik tak lepas dari anggapan bahwa KB jenis suntik relatif mudah penggunaannya dan tidak mahal, serta bisa memilih jangka waktunya. Sedangkan jenis alat KB untuk laki-laki (MOP dan kondom/karet KB) hanya sekitar 1.78 persen.

**Tabel 7.5**  
**Persentase Perempuan Usia 15-49 Yang Berstatus Kawin**  
**Menurut Alat/Cara Kontrasepsi Yang Sedang Digunakan, Tahun 2017.**

No.	Alat/cara KB Yang Sedang Digunakan	Persentase
1	MOW/tubektomi	6,38
2	MOP/vasektomi	0,14
3	AKDR/IUD/spiral	10,50
4	Suntikan KB	49,52
5	Susuk KB/norplan/inplanon/alwalit	2,10
6	Pil KB	25,76
7	Kondom/karet KB	1,64
8	Tradisional	3,96
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>

*Sumber: Susenas Tahun 2017.*

### 7.3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui perkiraan rata-rata lamanya hidup yang dijalani seseorang sejak ia dilahirkan. Indikator ini juga berguna dalam mengidentifikasi kualitas kesehatan. Semakin lama umur hidup yang dijalani merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatan dan kualitas hidupnya, walaupun kesehatan bukan merupakan satu-satunya indikator peluang hidup lama seseorang.

**Gambar 7.1.**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup Tahun 2015 - 2017**



Pada tahun 2017 ini angka harapan hidup bagi laki-laki adalah sebesar 71,78 tahun sedangkan angka harapan hidup perempuan sebesar 75,54 tahun (gambar 7.1). Angka harapan hidup ini memberikan gambaran bahwa bayi laki-laki yang dilahirkan sekitar tahun 2017 akan bisa hidup sampai pada usia 72 tahun sedangkan perempuan sampai pada usia 75 tahun. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu terpaut sekitar 3 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup ini secara tidak langsung memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kesehatannya sehingga penduduk dengan usia yang lebih panjang tersebut tidak menjadi beban bagi penduduk lainnya

## **BAB VIII**

### **KETENAGAKERJAAN**

Kedudukan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi perempuan dan laki-laki telah terkandung dalam UUD 1945 dimana dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia secara umum telah mengupayakan kesetaraan bagi seluruh warganya baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan menentukan jenis dan status pekerjaan. Namun dalam kenyataannya apa yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar tersebut belum berjalan dengan semestinya.

Kesempatan memperoleh pekerjaan di sektor-sektor tertentu masih terdapat *gender preference* atau lebih mengutamakan Gender tertentu. Kesempatan bersaing antara laki-laki dan perempuan belum mencapai hasil yang diharapkan karena masih banyak paradigma lama dimana ada kecenderungan pemilihan salah satu Gender untuk sektor-sektor tertentu. Masih diperlukan upaya lebih baik lagi untuk mengurangi adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menduduki jabatan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

#### **8.1 Penggunaan Waktu Terbanyak**

Penggunaan waktu terbanyak dalam kegiatan sehari-hari akan memberikan gambaran mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan juga proporsi penghasilan dalam keluarga. Penggunaan waktu terbanyak juga dapat digunakan untuk mengetahui peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam konsep ketenagakerjaan penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK).

**Tabel 8.1**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Dilihat Dari Penggunaan Waktu Terbanyak Dalam Seminggu Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017.**

Uraian	Laki-laki		Perempuan	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>649.225</b>	<b>78,10</b>	<b>426.134</b>	<b>51,04</b>
- Bekerja	619.764	95,46	402.120	92,36
- Pengangguran	29.461	4,54	24.014	5,64
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>182.033</b>	<b>21,90</b>	<b>408.835</b>	<b>48,96</b>
- Sekolah	96.459	52,99	98.965	24,21
- Mengurus Rumahtangga	41.824	22,98	287.697	70,37
- Lainnya	43.750	24,03	22.173	5,42
<b>Jumlah</b>	<b>831.258</b>	<b>100,00</b>	<b>834.969</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Sakernas Tahun 2017.*

Persentase angkatan kerja tahun 2017 antara laki-laki dan perempuan relatif jauh berbeda yaitu masing-masing adalah sebesar 78,10 persen dan 51,04 persen sedangkan persentase angkatan kerja yang bekerja relatif hampir sama yaitu 95,46 persen untuk laki-laki dan 92,36 persen untuk perempuan. Kondisi ini memberikan gambaran perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kegiatan ekonomi. Laki-laki lebih banyak yang terlibat dalam akses kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan masih kuatnya kultur sosial yang terbentuk antara peran laki-laki dan perempuan pada masalah status ketenagakerjaan. Paradigma bahwa laki-laki lebih berkewajiban pada pemenuhan masalah ekonomi keluarga menjadikan adanya relatif pengurangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi perempuan.

Dari kelompok bukan angkatan kerja, pada perempuan didominasi oleh kegiatan mengurus rumahtangga yaitu sebesar 70,37 persen, sedangkan untuk laki-laki adalah kegiatan bersekolah yaitu sebesar 52,99 persen. Pola peran laki-laki dan tugas laki-laki adalah mencari nafkah sedangkan perempuan adalah mengurus rumahtangga/mengasuh anak masih terlihat pada kondisi tahun 2017.

**Tabel 8.2**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut TPAK, TPT, TKK**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017.**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>TPAK</b>	78,10	51,04	64,54
<b>TKK</b>	95,46	94,36	95,03
<b>TPT</b>	4,54	5,64	4,97

*Sumber : Sakernas Tahun 2017.*

Masalah ketenagakerjaan yang banyak menjadi perhatian adalah tingkat pengangguran. Dari penduduk yang masuk dalam kelompok angkatan kerja, angka pengangguran terbuka antara laki-laki dan perempuan relatif sama yaitu sekitar 5 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu persentase angkatan kerja terhadap usia kerja pada perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Jika dilihat dari kategori kegiatan kelompok bukan angkatan kerja pada perempuan, kategori mengurus rumah tangga memiliki persentase lebih dari 70 persen.

## **8.2. Lapangan Pekerjaan**

Lapangan pekerjaan merupakan tempat bekerjanya seseorang yang menggambarkan jenis/bidang pekerjaan. Dalam pembahasan ini lapangan pekerjaan yang dimaksud adalah lapangan pekerjaan yang utama. Apabila seseorang mempunyai lebih satu jenis pekerjaan maka yang dimasukkan adalah yang utama. Lapangan pekerjaan yang utama ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang menghabiskan waktu terbanyak menghasilkan pendapatan paling besar.

Dengan mengetahui jenis lapangan pekerjaan yang ditekuni penduduk suatu wilayah, kita dapat mengetahui struktur kegiatan ekonomi wilayah tersebut. Dari informasi jenis lapangan usaha terbanyak, dapat diketahui apakah daerah tersebut merupakan daerah industri ataupun sektor lainnya.

Penduduk Kabupaten Sidoarjo sebagian besar bekerja pada sektor industri (seperti terlihat pada Tabel 8.3), yaitu sekitar 35,25 persen, kemudian sektor



perdagangan sekitar 24,30 persen dan yang ketiga sektor jasa-jasa sekitar 21,15 persen. Lapangan usaha yang lebih dipilih oleh pekerja laki-laki tertinggi adalah sektor industri dengan persentase sebesar 38,99 persen, selanjutnya sektor perdagangan sekitar 19,41 persen dan sektor jasa sebesar 16,34 persen. Hal yang berbeda terjadi pekerja perempuan. Persentase tertinggi pekerja perempuan bekerja di sektor perdagangan sebesar 31,83 persen, selanjutnya sektor industri sebesar 29,48 persen, dan sektor jasa sebesar 28,56 persen. Ada perbedaan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan pada lapangan pekerjaan Perdagangan serta Jasa. Pada sektor perdagangan terlihat bahwa persentase pekerja perempuan di sektor ini lebih tinggi dibanding dengan pekerja laki-laki, sedangkan untuk sektor Jasa persentase pekerja laki-laki jauh lebih tinggi dibanding pekerja perempuan.

**Tabel 8.3**  
**Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan**  
**Sektor Lapangan Pekerjaan Yang Utama**  
**Di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2017.**

No.	Jenis Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	3,62	2,61	3,22
2	Pertambangan dan Pengecilan	0,58	0,00	0,35
3	Industri	38,99	29,48	35,25
4	Listrik, Gas dan Air	0,42	0,19	0,33
5	Konstruksi	9,34	0,62	5,91
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	19,41	31,83	24,30
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6,19	1,93	4,52
8	Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Jasa Perusahaan	5,10	4,77	4,97
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	16,34	28,56	21,15
<b>Jumlah</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Sakernas Tahun 2017.

### 8.3 Status Kedudukan Dalam Pekerjaan

Status kedudukan dalam pekerjaan memberikan gambaran tentang kemampuan serta posisi dalam bidang pekerjaan tersebut. Seseorang yang berkedudukan sebagai pengusaha tentu berbeda dengan karyawan dan juga mereka yang berstatus sebagai pekerja dibayar juga akan berbeda dengan mereka yang berstatus pekerja tak dibayar. Status kedudukan dalam pekerjaan juga mencerminkan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan juga dapat memberikan gambaran besaran pendapatan yang diterima pekerja.

**Tabel 8.4**  
**Persentase Status Kedudukan Dalam Pekerjaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017.**

No.	Status Kedudukan Dalam Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Berusaha Sendiri	13,91	19,98	16,30
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar	3,92	4,12	4,00
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	2,31	1,76	2,09
4	Buruh/Karyawan / Pegawai	69,67	60,95	66,24
5	Pekerja Bebas Pertanian	1,53	1,32	1,45
6	Pekerja Bebas Di Non Pertanian	5,63	3,15	4,65
7	Pekerja Tidak Dibayar	3,04	8,72	5,27
	Jumlah	100	100	100

*Sumber : Sakernas Tahun 2017.*

Dari tabel 8.4 terlihat, persentase tertinggi baik untuk pekerja laki-laki dan perempuan adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sekitar 60 hingga 70 persen. Hal ini sesuai mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan kota industri yang banyak menyerap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena menarik lain adalah bahwa persentase perempuan yang bersatus pengusaha ternyata lebih besar dibandingkan laki-laki. Seperti telah diulas pada uraian sebelumnya, bahwa persentase tertinggi untuk pekerja perempuan adalah pada

sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi dimana pada sektor tersebut notabene merupakan sektor yang dapat diusahakan sendiri.

#### 8.4 Jumlah Jam Kerja

Jumlah jam kerja di sini diukur dari rata-rata jam kerja per minggu. Informasi jumlah jam kerja per minggu dapat digunakan sebagai indikator produktivitas tenaga kerja. Semakin besar persentase tenaga kerja yang bekerja di atas jam kerja normal (35 jam ke atas dalam seminggu), maka semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja tersebut.

Secara umum tenaga kerja menurut jumlah jam kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu kurang dari 35 jam dalam seminggu yang sering dikenal sebagai pekerja tidak penuh atau pengangguran terselubung dan lebih dari 35 jam kerja dalam seminggu atau disebut sebagai pekerja penuh.

**Tabel 8.5**  
**Persentase Jumlah Jam Kerja Perminggu Antara**  
**Laki-Laki dan Perempuan, Tahun 2017.**

No.	Jumlah Jam Kerja Per Minggu	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sementara Tidak Bekerja	0,78	0,98	0,86
2	< 35 Jam	8,83	22,19	14,09
3	35 - 44 Jam	26,53	28,58	27,34
4	45 +	63,86	48,24	57,71
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Sakernas Tahun 2017.*

Dari tabel 8.5 terlihat bahwa tenaga kerja yang bekerja di atas jam kerja normal (bekerja lebih dari 35 jam seminggu) adalah sebesar 85 persen. Penduduk perempuan yang bekerja kurang dari jam kerja normal yaitu antara < 35 jam terlihat lebih tinggi dibanding pekerja laki-laki. Pada durasi jam kerja lebih tinggi persentase pekerja laki-laki lebih besar dibanding pekerja perempuan. Hal ini tentunya tidak lepas dari perbedaan faktor biologis antara laki-laki dan perempuan.

## BAB IX

### SEKTOR PUBLIK

Pembangunan dewasa ini semakin dituntut untuk lebih memperhatikan isu-isu Gender. Laki-laki maupun perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dalam penentuan arah dan gerak dari pembangunan bangsa dan tidak bisa lagi terfokus pada salah satu Gender. Peran aktif dengan memperhatikan keseimbangan Gender sangat diharapkan baik pada lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan yudikatif serta pada jabatan kenegaraan. Fenomena ini terlihat hampir di seluruh daerah, tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah.

#### 9.1 Legislatif

Pemilu Legislatif 2009 merupakan Pemilu Legislatif pertama yang mensyaratkan adanya sejumlah calon legislatif dari kalangan perempuan. Proporsi calon legislatif perempuan yang diusulkan masing-masing partai peserta pemilu diharapkan mampu mencapai 30 persen.

**Tabel 9.1**  
**Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin Dan Asal Partai, Tahun 2017.**

No.	Partai Peserta Pemilu 2014	Anggota Legislatif		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai NasDem	1	-	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	12	1	13
3	Partai Keadilan Sosial	3	-	3
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	-	8
5	Partai Golongan Karya	4	1	5
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	1	7
7	Partai Demokrat	1	3	4
8	Partai Amanat Nasional	7	-	7
9	Partai Persatuan Pembangunan	-	1	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-
11	Partai Bulan Bintang	1	-	1
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>7</b>	<b>50</b>

Pemilu Legislatif terakhir yang dilaksanakan adalah pemilu legislatif tahun 2014. Dari sejumlah calon DPRD tersebut yang terpilih adalah sebanyak 50 calon,

dengan komposisi laki-laki sebanyak 43 orang (86 persen) dan perempuan 7 orang (14 persen). Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin dan asal partai dapat dilihat pada table 9.1.

Walaupun jumlah anggota DPRD perempuan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 ini masih jauh dibandingkan dengan laki-laki, namun jika kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang baik. Pada pemilu sebelumnya jumlah anggota DPRD dari perempuan antara 2 dan 4 persen, sedangkan pada tahun 2017 ini sebanyak 14,29 persen.

**Tabel 9.2**  
**Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 1999 - 2017.**

Tahun	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1999	43	95.56	2	4.44
2004	44	97.78	1	2.22
2009	43	86.00	7	14.00
2012	42	84.00	8	16.00
2013	42	84.00	7	14.29
2014	43	86.00	7	14.00
2015	43	86.00	7	14.00
2016	43	86.00	7	14.00
2017	43	86.00	7	14.00

## 9.2 Perempuan Dan Laki-Laki Pegawai Negeri Sipil

Dengan semakin gencarnya dilaksanakan program berbasis kesetaraan Gender dan seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan perempuan, maka semakin banyak bidang pekerjaan yang bisa dimasuki oleh kaum perempuan. Salah satu bidang tersebut adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum program kesetaraan Gender berkembang, dulu sangat sedikit dan jarang perempuan yang bisa menduduki jabatan tertentu, namun sekarang banyak perempuan yang sudah mendapatkan tempat atau kedudukan. Pada saat ini di lingkungan Pemkab Sidoarjo perempuan sudah banyak yang menduduki jabatan struktural.

**Tabel 9.3**  
**Jumlah PNS Dilingkungan Pemkab Sidoarjo Berdasarkan**  
**Golongan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017.**

Golongan	Jumlah		Persentase	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	322	14	95,83	4,17
II	1.664	1.024	61,90	38,10
III	2.008	3.330	37,62	62,38
IV	1.347	2.520	34,83	65,17
<b>2017</b>	<b>5.341</b>	<b>6.888</b>	<b>43,67</b>	<b>56,33</b>
<b>2016</b>	<b>5.654</b>	<b>6.958</b>	<b>44,83</b>	<b>55,17</b>
<b>2015</b>	<b>6.517</b>	<b>8.092</b>	<b>44,61</b>	<b>55,39</b>

*Sumber : Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2017.*

Pada tahun 2017 jumlah PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo keseluruhan adalah sebanyak 12.229 personil dan lebih dari setengahnya adalah perempuan yaitu sebesar 56.33 persen sedangkan laki-laki sebesar 43.67 persen. Dilihat menurut golongan, persentase PNS perempuan semakin besar seiring dengan golongan kepangkatan yang lebih tinggi.

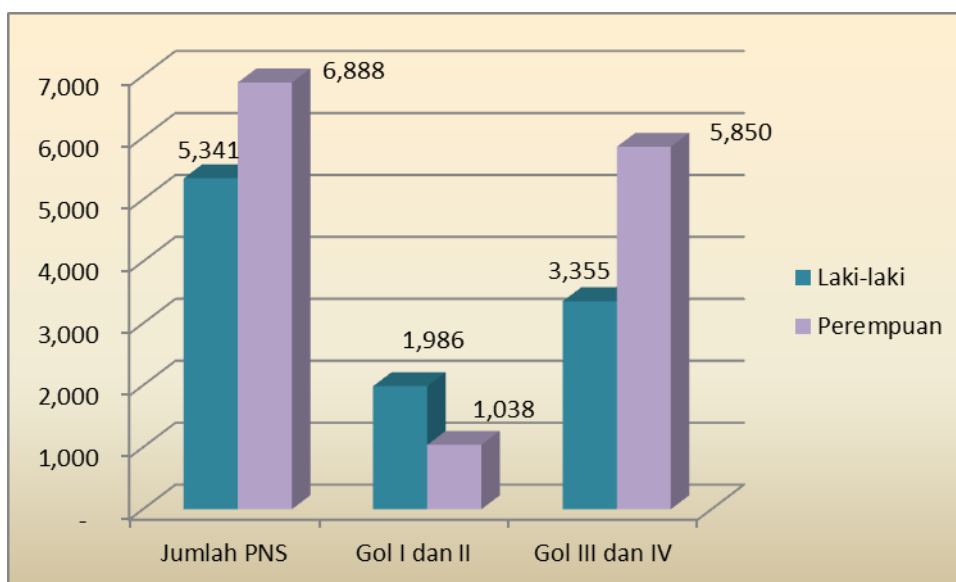
Dilihat dari tingkat pendidikan pada tahun 2017 terlihat bahwa tingkat pendidikan PNS laki-laki pada sekolah setingkat SLTA ke bawah lebih banyak dibandingkan perempuan sedangkan PNS yang berpendidikan Akademi sampai Perguruan Tinggi secara umum lebih banyak perempuan.

**Tabel 9.4**  
**Jumlah PNS di Lingkungan Pemkab Sidoarjo Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017.**

Tingkat Pendidikan	Jumlah		Persentase	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
SD	262	6	97.76	2.24
SLTP	470	19	96.11	3.89
SLTA	1.404	809	63.44	36.56
Diploma	507	1.500	25.26	74.74
S1	2.322	4.206	35.57	64.43
S2	372	345	51.88	48.12
S3	4	3	57.14	42.86
<b>Jumlah</b>	<b>5.341</b>	<b>6.888</b>	<b>43.67</b>	<b>56.33</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

**Gambar 9.1**  
**Persentase Jumlah PNS, Golongan dan Pemegang Jabatan**  
**Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017**



Dari gambar 9.1 terlihat bahwa komposisi jumlah PNS, Golongan untuk perempuan masih lebih tinggi dibanding laki-laki. Kondisi ini tidak diikuti pada komposisi pemegang jabatan. Pemegang jabatan masih lebih banyak ambil oleh laki-laki.

## **BAB X**

### **INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)**

Kesejahteraan penduduk merupakan tujuan akhir dari semua proses pembangunan. Pembangunan manusia tentunya dengan tidak membedakan suku, agama, asal maupun jenis kelamin. Pembangunan di negara kita yang telah dilakukan disemua bidang, ditenggarai lebih banyak menguntungkan laki-laki, namun diperlukan suatu ukuran untuk menjawab hal tersebut dan juga perlu adanya kajian yang mendalam terhadap keseluruhan aspek pembangunan.

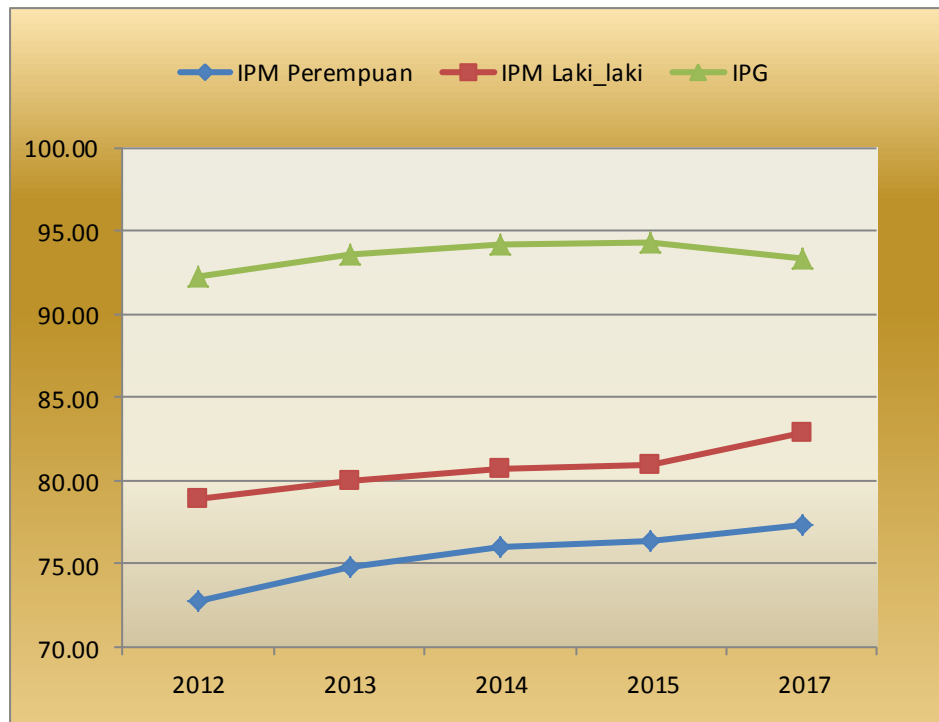
Salah satu cara untuk mengetahui adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dengan mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Development Index (GDI)* merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender, pada dasarnya hampir sama dengan penghitungan IPM tetapi disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh perundang-undangan yang dihasilkan oleh negara maupun lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Namun pada implementasinya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena terkait beberapa kendala diatas. Untuk mewujudkan persamaan status dan kedudukan perempuan dan laki-laki diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan seperti



peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi Pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya.

**Gambar 10.1**  
**Perkembangan IPG Kabupaten Sidoarjo, 2012 -2017**



Keterangan : IPG Tahun 2016 tidak disajikan karena tidak dilaksanakan Sakernas untuk penghitungan angka ketenagakerjaan level kabupaten/kota

Mulai tahun 2014 metodologi penghitungan IPG mengalami perubahan dengan menggunakan metode baru. Akibat perubahan metodologi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, untuk melihat keberhasilan pembangunan gender angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, namun dengan menggunakan metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Angka IPG berdiri sendiri, semakin besar/mendekati nilai 100 maka capaian pembangunan gender semakin baik. Nilai 100 memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara. Sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan

untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Karena metode yang baru angka IPG merupakan Rasio dari angka IPM Perempuan terhadap Angka IPM laki-laki.

Dari hasil penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggunakan metode baru tahun 2017 didapatkan IPG Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 93,33, capaian angka IPG ini lebih besar dari capaian angka IPG Jawa Timur yang sebesar 90,76. Kalau kita perhatikan angka IPG Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir, seperti yang terlihat pada gambar 4.1, angka IPG Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2012 hingga 2017 mengalami fluktuasi naik dan turun meskipun tidak terlalu signifikan, mulai 92,21 di tahun 2012 naik menjadi 93,53 di tahun 2013, selanjutnya menjadi 94,20 pada tahun 2014, terus naik hingga tahun 2015 menjadi 94,28. IPG tahun 2016 tidak disajikan karena pada tahun tersebut Sakernas tidak dilaksanakan untuk penghitungan angka ketenagakerjaan sampai dengan level kabupaten/kota. Pada tahun 2017, IPG mengalami penurunan sebesar 93,33. Menurunnya angka IPG Kabupaten Sidoarjo dikarenakan semakin besarnya jarak antara angka IPM laki-laki dan IPM perempuan. Pada tahun 2012 selisih angka IPM perempuan dan laki-laki sebesar 6,15 dan selisih ini mengecil pada tahun 2013 sebesar 5,17, tahun 2014 menjadi 4,68 dan pada tahun 2015 sebesar 4,63. Sementara pada tahun 2017 selisih IPM laki-laki dan perempuan melebar menjadi sebesar 5,53.

Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM, yaitu meliputi dimensi kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta ekonomi yang digambarkan oleh pengeluaran perkapita. Dari komponen pendukung tersebut yang memang terlihat masih terjadi selisih antara capaian pada perempuan dan laki-laki. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 75,54 tahun pada perempuan dan 71,78 tahun pada laki-laki. Pada dimensi pengetahuan yang mencolok adalah pada capaian rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dari perempuan, yaitu laki-laki 10,77 tahun sedangkan perempuan 9,70 tahun. Untuk lebih jelasnya komponen pendukung IPM perempuan dan laki-laki dapat dilihat pada tabel 10.1.

**Tabel 10.1**  
**Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2015 - 2017**

Komponen		2015		2016		2017	
		Perem- -puan	Laki- laki	Perem- -puan	Laki- laki	Perem- -puan	Laki- laki
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Proporsi penduduk (%)	49,76	50,24	49,76	50,24	49,76	50,24
2.	Angka Harapan Hidup (e <sub>0</sub> /Tahun)	74,94	70,99	-	-	75,54	71,78
3.	Harapan Lama Sekolah / EYS (Tahun)	14,14	13,61	-	-	14,28	14,37
4.	Rata-Rata Lama Sekolah/ MYS (Tahun)	9,64	10,63	-	-	9,70	10,77
5.	Pengeluaran Perkapita (Juta)	12,56	17,91	-	-	13,23	19,05
<b>IPG</b>		<b>94,28</b>		<b>-</b>		<b>93,33</b>	

## **BAB XI**

### **INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)**

Dalam aspek pemberdayaan terutama keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, perempuan juga relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Ketertinggalan ini sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan apapun yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hasil pemilu legislatif tahun 2014 menempatkan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo hanya sekitar 14 persen dari keseluruhan jumlah anggota.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengkaji lebih jauh peran perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Kesetaraan dan keadilan gender sering dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Makna dari kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian

persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peran.

Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peran yang proposional dalam hal proses pengambilan keputusan di bidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga.

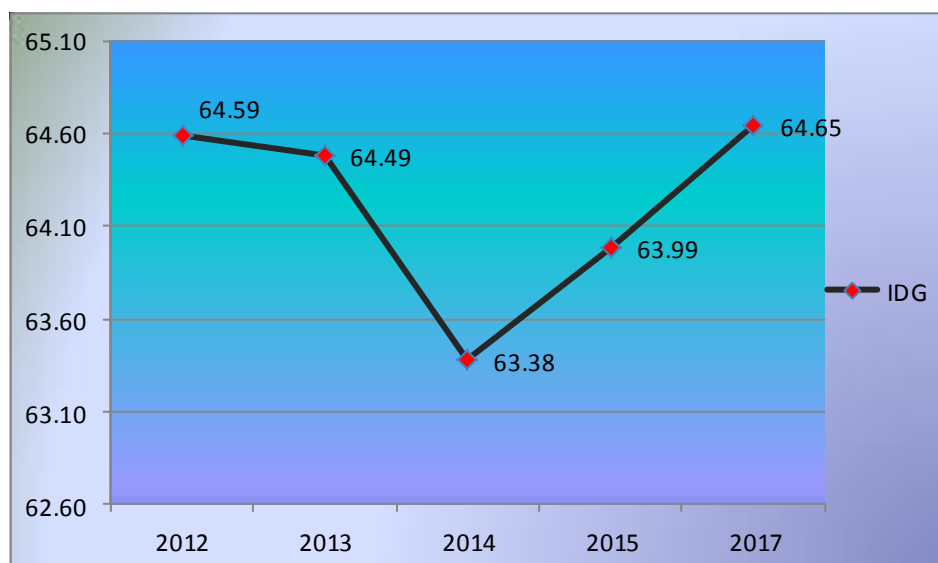
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peran, bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada soal pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survey) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (current condition) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak mengalami perubahan seperti IPG maupun IPM. Penghitungannya masih tetap berdasarkan tiga komponen dengan agregasi deret ukur/aritmatik yaitu capaiannya merupakan pembagian dari ketiga komponen tersebut.

Capaian IDG Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 adalah sebesar 64,65 kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 0,66 point jika dibandingkan capaian pada tahun 2015. Tahun 2016 tidak dapat menyajikan data IDG karena Sakernas 2016 hanya dilakukan untuk penghitungan data ketenagakerjaan sampai dengan tingkat provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 11.1.

**Gambar 11.1**  
**Perkembangan IDG Kabupaten Sidoarjo, 2010 -2017**



Keterangan : IDG Tahun 2016 tidak disajikan karena tidak dilaksanakan Sakernas untuk penghitungan angka ketenagakerjaan level kabupaten/kota

Kalau kita perhatikan komponen pembentuk IDG tahun 2017 di Kabupaten Sidoarjo satu komponen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, yaitu komponen proporsi dari manager, staf administrasi, namun pada komponen keterwakilan perempuan di parlemen tidak ada perubahan. Kalau kita lihat sebenarnya jumlah penduduk perempuan di Jawa Timur lebih banyak laki-laki dari pada perempuan hal ini terlihat dari angka sex ratio sebesar 100,97 persen. Angka sex ratio ini memberikan gambaran bahwa 101 penduduk laki-laki berbanding dengan 100 penduduk perempuan. Namun dalam hal politik terlihat bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih sedikit. Meskipun dalam perundangan Pemilu ada batas minimal setiap partai peserta pemilu untuk mengusulkan calon anggota dewan dari perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen akan mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.1.

**Tabel 11.1**  
**Komponen Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**  
**Provinsi Jawa Timur, 2015- 2017**

Komponen		2015		2016		2017	
		Perem- puan (6)	Laki- laki (7)	Perem- puan (8)	Laki- laki (9)	Perem- puan (10)	Laki- laki (11)
(1)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Proporsi penduduk (%)	49,76	50,24	49,76	50,24	49,76	50,24
2.	Keterwakilan diparlemen (%)	14	76	-	-	14	76
3.	Proporsi dari manager, staff administrasi, pekerja profesional dan teknisi (%)	47,24	52,76	-	-	47,21	52,79
4.	Proporsi Angkatan Kerja (Persentase Penduduk Aktif Dalam Kegiatan Ekonomi)	29,00	71,00	-	-	29,36	70,64
<b>IDG</b>		<b>63,99</b>		<b>-</b>		<b>64,65</b>	

## **BAB XII**

### **P E N U T U P**

#### **11.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 (hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010) sebesar 2.183.682 jiwa yang terdiri dari 1.097.094 laki-laki dan 1.086.588 perempuan dengan sex ratio 100,97.
2. Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 93,33.
3. Pada tahun 2017 Angka Komponen IPG di bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup untuk laki-laki sebesar 71,78 tahun sedangkan perempuan 75,54 tahun.
4. Pada tahun 2017 Angka Komponen IPG di bidang pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah untuk laki-laki sebesar 14,37 persen dan perempuan sebesar 14,28 persen, sedangkan untuk rata-rata lama sekolah untuk laki-laki sebesar 10,77 tahun dan perempuan sebesar 9,70 tahun.
5. Angka Komponen IPG di bidang ekonomi dari segi pengeluaran perkapita untuk laki-laki sebesar 19,05 juta dan perempuan sebesar 13,23 juta.
6. Angka IDG Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 adalah sebesar 64,65.



## 11.2 Saran-Saran

Nilai IDG di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM Kabupaten Sidoarjo yang sebesar 78,70. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk peningkatan nilai IPG dan IDG Kabupaten Sidoarjo antara lain adalah:

1. Pemerintah daerah lebih menekankan arah dan kebijakan program pembangunan yang lebih berimbang pada kesetaraan gender.
2. Bentuk-bentuk kebijakan yang lebih bisa memastikan adanya kesempatan yang sama sesuai kapabilitas dari laki-laki maupun perempuan untuk berperan aktif di seluruh bidang pembangunan mesti lebih ditingkatkan.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan yang lebih menekankan pada kesetaraan gender, untuk lebih meningkatkan komponen IPG dan IDG yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, proporsi sumbangan pendapatan serta peluang menduduki jabatan salah satunya keterwakilan di parlemen.

